

Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data di Kabupaten Dairi

Daulat Mangihut Pakpahan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.412>

*Correspondence: Daulat Mangihut

Pakpahan

Email:

mangihutpakpahan@gmail.com

Received: 20-12-2025

Accepted: 20-01-2026

Published: 20-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perencanaan pembangunan daerah berbasis data merupakan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikembangkan sebagai platform nasional yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan SIPD di beberapa daerah belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta organisasi perangkat daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu meningkatkan integrasi data dan konsistensi dokumen perencanaan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permasalahan teknis sistem, serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal. Meskipun demikian, SIPD memiliki peran penting sebagai instrumen good governance dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan sistem dan koordinasi lintas sektor.

Kata kunci: SIPD, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Berbasis Data, Pemerintahan Daerah, *Good Governance*

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi utama dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Conyers, 1994) (Ndraha, 2011). Kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan (Indrajit, 2016).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem nasional yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah (Kementerian

Dalam Negeri RI, 2019). SIPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sejalan dengan konsep good governance (UNDP, 2015).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-government di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (Dwiyanto, 2011) (Osborne, 2010). Di Kabupaten Dairi, SIPD telah diterapkan sebagai instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait konsistensi data dan koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data di Kabupaten Dairi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu fungsi utama dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem nasional yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. SIPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Di Kabupaten Dairi, SIPD telah diterapkan sebagai instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait konsistensi data dan koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data di Kabupaten Dairi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi dan optimalisasi SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Dairi dengan fokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses perencanaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi terhadap penggunaan SIPD, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Dairi melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), organisasi perangkat daerah (OPD), operator SIPD, serta pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan strategis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi penggunaan SIPD, dan studi dokumentasi terhadap RPJMD dan RKPD. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah berfungsi sebagai instrumen integrasi perencanaan yang mampu meningkatkan konsistensi program, kegiatan, indikator kinerja, dan penganggaran antar perangkat daerah. Integrasi sistem meminimalisasi duplikasi program serta memperkuat keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Korelasi analitis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan ketepatan input data oleh OPD berpengaruh langsung terhadap kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.

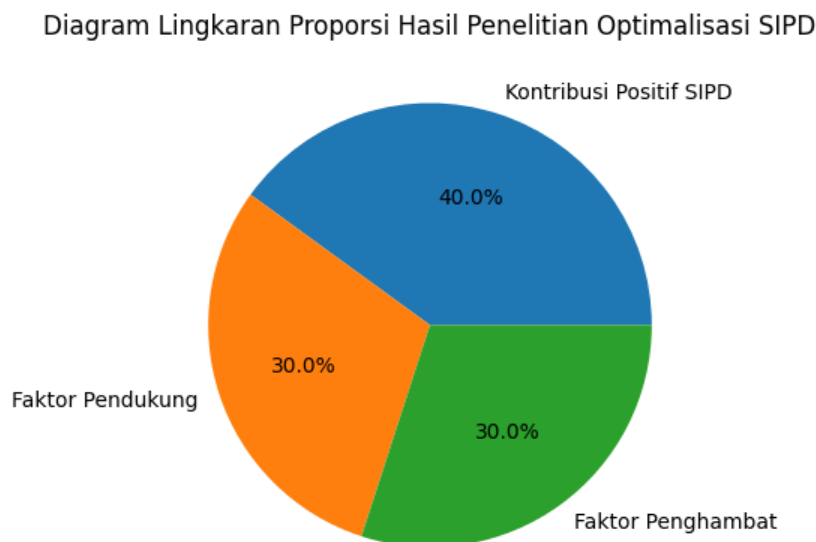
Secara operasional, proses implementasi SIPD meliputi tahapan input data oleh OPD, verifikasi oleh Bappeda, serta sinkronisasi dengan sistem nasional. Meskipun alur kerja telah terstandarisasi, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan stabilitas sistem aplikasi. Temuan menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kompetensi operator dan kualitas data, di mana keterbatasan pemahaman teknis berdampak pada inkonsistensi indikator dan perlunya revisi berulang.

Faktor pendukung implementasi meliputi regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, komitmen pimpinan daerah, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Dukungan kebijakan dan pengawasan pimpinan terbukti memperkuat kepatuhan OPD dalam pemanfaatan SIPD secara optimal.

Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan kompetensi aparatur, perubahan sistem yang relatif dinamis, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan input data dan perlunya penyesuaian teknis berulang.

Secara keseluruhan, SIPD berkontribusi positif dalam mendorong perencanaan pembangunan daerah berbasis data melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dokumen. Namun demikian, optimalisasi berkelanjutan memerlukan penguatan kapasitas aparatur, stabilisasi sistem aplikasi, serta peningkatan koordinasi kelembagaan agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara maksimal.

Diagram Hasil Penelitian



Gambar 1. Proporsi hasil penelitian

Gambar 1 Proporsi hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi positif SIPD mendominasi temuan (40%), diikuti faktor pendukung (30%) dan faktor penghambat (30%). Distribusi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kendala implementasi, peran SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data tetap signifikan.

Simpulan

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Dairi terbukti berkontribusi nyata dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data. Hasil pengolahan data dan observasi menunjukkan bahwa kontribusi positif SIPD mendominasi temuan penelitian sebesar 40%, yang tercermin pada meningkatnya integrasi data antar dokumen perencanaan, konsistensi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, serta penurunan potensi duplikasi perencanaan. Selain itu, faktor pendukung implementasi menempati porsi 30%, meliputi kejelasan regulasi nasional, komitmen pimpinan daerah, serta

ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendorong kepatuhan organisasi perangkat daerah dalam pemanfaatan SIPD secara sistematis. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi 30% faktor penghambat yang memengaruhi tingkat optimalisasi SIPD, terutama keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dinamika perubahan sistem aplikasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya efektif, sehingga berdampak pada keterlambatan dan ketidakkonsistenan input data. Dengan demikian, SIPD telah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data, namun optimalisasi berkelanjutan mensyaratkan penguatan kapasitas aparatur, stabilisasi sistem, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajit, R. E. (2016). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- LAN RI. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance?*. London: Routledge.

- Putra, F. (2018). Implementasi e-Government dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–115.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021–2026. (2021). Kabupaten Dairi: Pemerintah Daerah.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subroto, E., Tensiska, & Indiarto, R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*, 13(1), 1–4.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Swasta*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran.
- UNDP. (2015). *Good Governance and Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Bank. (2016). *Digital Dividends*. Washington DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.